RESPONSIVITAS PEMERINTAH KOTA DUMAI TERHADAP LIMBAH B3 DI SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2017-2018

Muazzoful Khalili Nasution

Email: Muaz30zoful@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Industrial activities produce a variety of environmental wastes, the most hazardous waste to the environment and health is waste that is categorized as toxic hazardous waste. B3 waste pollution can be through land, water, or air. The pollution causes environmental degradation. Industrial development not only has a positive impact but also a negative impact, namely in the form of industrial waste which if not managed properly and correctly will disturb the environmental balance. Then how about responsiveness and inhibiting factors of the Dumai City Government in B3 waste pollution in the Sembilan river.

The purpose of this study was to determine the responsiveness of the Dumai City Government in tackling B3 waste pollution in the Sembilan river and to find out what are the factors that inhibit the Dumai City Government in tackling the B3 waste pollution in the Sembilan river. The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research.

The results of this study are the Government of the City of Dumai itself has not been able to solve the problem of B3 waste that is in the Sembilan City river, because of the gaps in the city of Dumai as a technical institution not having the ability to execute, plus incomplete infrastructure and lack of human resources skills. the factors which hamper this waste management are the limited budget, facilities and infrastructure and human resources that are not comparable with the volume of waste, as well as the lack of community participation not to litter.

Keywords: Responsiveness, B3 waste

RESPONSIVITAS PEMERINTAH KOTA DUMAI TERHADAP LIMBAH B3 DI SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2017-2018

Muazzoful Khalili Nasution

Email: Muaz30zoful@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Aktivitas industri menghasilkan berbagai limbah lingkungan, limbah yang paling berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan adalah limbah yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya beracun. Pencemaran limbah B3 dapat melalui tanah, air, maupun udara. Pencemaran tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Perkembangan industri bukan hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Maka bagaimana Responsivitas dan faktor penghambat Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan dan mengetahui apa saja faktor – faktor yang menghambat Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Dumai sendiri belum bisa menyelesaikan masalah limbah B3 yang ada sungai Sembilan Kota Dumai, dikarenakan adanya kesenjangan pemerintah kota dumai sebagai lembaga teknis tidak mempunyai kemampuan untuk mengeksekusi, ditambah lagi sarana prasarana yang tidak lengkap dan kurangnya skilil sumber daya manusia Adapun faktor yang menjadi penghambat pengelolaan sampah ini adalah terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan volume sampah, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci : *Responsivitas, Limbah B3*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas industri menghasilkan berbagai limbah lingkungan, limbah yang paling berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan adalah limbah yang dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya Beracun. Pencemaran limbah B3 dapat melalui tanah, air, maupun udara. Pencemaran tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Sering di jumpai tindakan orang atau bahkan sekelompok orang yang menjalankan suatu kegiatan industri hanya mengejar kepentingan dan kemajuannya sendiri tanpa menghiraukan hak orang lain dan lingkungan dimana industri itu berdiri. Kelalaian dari industri tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan, yang nantinya akan merugikan orang disekitar industri tersebut.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan hidup pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3),

memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB VII (Pengelolaan Limbah B3) paragraph kedua pengawasan pengelolaan limbah B3 pasal 78, pengawasan limbah B3 meliputi pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3, dan pasal 79 menyebutkan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78, dilakukan oleh Walikota melalui DLH dan DPRD, dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaatan, pengumpul, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, DLH berwenang :

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan
4. Memasuki tempat tertentu
5. Memotret dan membuat rekaman audio visual
6. Mengambil sampel
7. Memeriksa peralatan

8. Memeriksa instalasi dan alat transportasi
9. Menghentikan pelanggaran tertentu

Dalam pasal 81 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan setiap badan usaha atau orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali kepada Walikota melalui DLH.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Upaya pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi limbah dengan mengoptimalkan penyimpanan bahan baku dalam proses kegiatan atau house keeping, substitusi bahan, modifikasi proses, maupun upaya reduksi lainnya.

2. Kegiatan pengemasan dilakukan dengan penyimbolan dan pelabelan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 berdasarkan acuan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kota Dumai merupakan salah satu pusat produksi CPO (Crude Palm Oil), sehingga terdapat banyak industri pengolahan CPO di Kota Dumai, Seperti Kawasan Industri Lubuk Gaung di Kecamatan Sungai Sembilan, Kawasan Industri Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kawasan Industri Pengembangan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Dumai Barat dan Kawasan Industri Pengolahan Migas PT Pertamina. Pertumbuhan perusahaan industri pengolahan kelapa sawit di Dumai kian menjamur dan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh perusahaan industri itu per-harinya.

Kawasan di sungai sembilan tersebut tidak hanya pabrik saja yang berdiri, melainkan masih banyak pemukiman penduduk yang tinggal di sekitar pabrik. Masyarakat yang bermukim disekitar industri sangat tersiksa dengan debu tebal dari kendaraan truk milik perusahaan, bau asap perusahaan, polusi asap hitam, serta serbuk sisa pembakaran yang sering berterbangan yang ada dikawasan sungai sembilan tersebut. Dengan keadaan seperti ini masyarakat

selalu menghirup udara yang sudah tercemar akibat debu lalu lintas truk serta tercemar dari sisa-sisa pembakaran hasil produksi perusahaan.

Berikut ini jumlah perusahaan industri kelapa sawit atau Crued Palm Oil (CPO) di sungai sembilan.

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan
1	PT. Intibenua	Industri minyak goreng
2	PT. Dabi oleo	Industri pengolahan minyak sawit
3	PT. Energi unggul persada	Industri pengolahan minyak sawit
4	PT. Meridan sejati surya	Pabrik kelapa sawit
5	PT. Ivomas tunggal	Pengolahan minyak kelapa sawit
6	PT. Energi sejahtera mas	Industri pengolahan minyak nabati
7	PT. Pacific indopalm	pengolahan minyak kelapa sawit
8	PT. Sari dumai sejati	Indsutri minyak goreng

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, 2019.

Adapun fenomena-fenomena yang berkaitan dari Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan limbah industri kelapa sawit di kawasan Lubuk Gaung Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Sisa pembakaran batu bara berterbangan di udara, sisa olahan *oleo chemical* dibuang ke drainase masyarakat, dan masyarakat selalu menghirup udara yang tidak sedap. Limbah B3 jenis *Spent Bleaching Eart* dan *fly ash* dan *battom ash* sering digunakan masyarakat untuk tanah timbun dan bahan membuat batu bata.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang limbah industri dengan judul : **“Responsivitas Pemerintah Kota Dumai Terhadap Limbah B3 Di Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2017 - 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan ?
2. Apa saja faktor – faktor yang menghambat Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan

yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan
- b. Untuk Mengetahui faktor – faktor yang menghambat Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak lain yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama terutama di program studi Ilmu Pemerintahan
- b. Hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan dengan memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Responsivitas

Responsivitas menurut Dwiyanto merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan dari masyarakat. Pentingnya mewujudkan apa yang telah di respon tersebut ke dalam program dan kegiatan pelayanan adalah merupakan bentuk dari kewajiban birokrasi dan pengabaian terhadap hal tersebut akan berdampak pada kekecewaan yang burujung pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah¹.

Menurut Dwiyanto responsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator yaitu:

1. Keluhan Pengguna jasa
2. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa
3. Penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik

Tindakan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penempatan pengguna jasa dalam sistem pelayanan yang berlaku²

Mengenai responsivitas dapat disimpulkan bahwa responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekati layanan terhadap masyarakat perlu upaya unrtuk

¹ Dwiyanto Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press , 2006. Hal 148

² Ibid.,Hal 151

mengenali apa saja kebutuhan masyarakat. Kemudian pengenalan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat dapat merasa puas.

Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik yang paling baik dari sekian banyak sistem yang ada saat ini. Secara umum demokrasi adalah suatu model pemerintahan atau sistem sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh, dan/atau rakyat.

Untuk mendukung terlaksananya demokrasi, perlu didukung oleh enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat pluralism, yaitu: kesadaran adanya pluralism, musyawarah, sejalan dengan tujuan, ada norma kejujuran dan mufakat, kebebasan nurani, dan adanya trial and error³.

Adapun unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain :

1. Negara hukum
2. Masyarakat madani
3. Aliansi kelompok strategis

Konsep Limbah

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang mengandung

bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal sebagai limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Bila ditinjau secara kimiawi, bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik⁴.

Limbah industri bersal dari kegiatan industri, baik karena proses secara langsung maupun proses secara tidak langsung. Limbah dari kegiatan industri adalah limbah yang terproduksi bersamaan dengan proses produksi, dimana produk dan limbah hadir pada saat yang sama. Sedangkan limbah tidak langsung terproduksi sebelum proses maupun sesudah proses produksi.⁵

Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dibagi menjadi empat bagian antara lain :

1. Limbah cair biasanya dikenal sebagai entitas pencemaran air. Komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik, dan bahan buangan anorganik
2. Limbah padat
3. Limbah gas dan partikel
4. Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Dampak dari limbah tersebut terjadi pencemaran terhadap lingkungan. Menurut Satrawijaya

^{3 3} Ubaedillah.A , Rozak Abdul, Pancasila demokrasi ham dan masyarakat madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hal 69

⁴ Kristanto, Philip, Ekologi industri, Yogyakarta: ANDI, 2002. Hal 169

⁵ Arief,Latar Muhammad, Pengolahan limbah industri dasar-dasar pengetahuan dan aplikasi di tempat kerja,Yogyakarta: CV andi offset, 2016. Hal 23

pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energy dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme.⁶

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran Limbah B3 di Sungai Sembilan

a) Responsivitas Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran Limbah B3 di Sungai Sembilan oleh DPRD Kota Dumai Bapak Johannes MP Tetelepta, SH, MH.

anggota DPRD Kota Dumai sangat menentang keras atas terjadi pencemaran limbah B3 di sungai Sembilan, adanya kesenjangan pemerintah sebagai lembaga teknis tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi. Di tambah lagi sarana prasarana yang tidak lengkap, kurangnya skill sumber daya manusia, dan kita kurang berani sehingga dampaknya akan terasa bagi kita kedepan terutama ekosistem darat, laut dan udara. Kota Dumai sendiri mempunyai perda nomor 5 tahun 2017, biar pelaku usaha yang mulai dari industri besar hingga home industri itu punya aturan regulasi yang mengatur pencegahan sampai penanggulangan.

⁶ Satrawijaya, A. Tresna, Pencemaran lingkungan, Jakarta: Rineka cipta, 2009. Hal 66

Untuk sanksi sendiri belum ada satupun sanksi yang keluar dari pemerintah hanya berupa teguran lisan atau sanksi administrasi yang paling tinggi. Ada beberapa penyebab:

1. Karena melibatkan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan ini adalah lembaga politis
 2. Internal ASN di pemerintah juga belum mempunyai wawasan bagaimana menjaga daerahnya
 3. Keterbatasan sarana dan prasarana
 4. Tenaga skill SDM yang kurang
 5. Dan wawasan yang belum memadai
- b) Tanggapan Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran Limbah B3 di Sungai Sembilan oleh sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Adyan Bp Harahap, S.STP.**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai akan menindak lanjuti perusahaan-perusahaan yang membuang limbah B3 dengan sengaja ataupun tidak sengaja karena itu akan merusak ekosistem lingkungan baik darat, laut dan udara . Dan perusahaan sendiri harus mengikuti SOP yang seperti apa, dan untuk perusahaan yang telah melanggar pencemaran limbah B3 akan dikenakan sanksi, Pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin

c) Tanggapan Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran Limbah B3 di Sungai Sembilan oleh bidang

Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Sri Ramadhani.

bidang limbah B3 akan merespon cepat bila ada pengaduan atau human eror yang terjadi pada perusahaan. di dalam hal ada juga keterlibatan DLH Kota, kemudian sebagai pengawasan ada DLH Provinsi, disini juga ada turun gakum, kemudian juga ada media pengawasnya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) limbah B3 perusahaan wajib mengikutinya. Sebagai berikut :

1. Penyimpanan sementara limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera
2. Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan
3. Setiap limbah B3 yang akan disimpan harus dikemas sesuai jenis dan karakteristik limbah B3
4. Peletakan kemasan dilakukan dengan baik dan tertata
5. Setiap memasukkan/menyimpan limbah B3 ke TPS B3, harus melakukan pencatatan di lbook penyimpanan yang telah disediakan
6. Pengelolaan lanjutan dilakukan di luar lokasi kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak ke-3
7. Setiap 90 hari dari pihak ke-3 akan mengambil limbah B3 dari TPS limbah B3
8. Petugas TPS limbah B3 melakukan pengawasan dan mendokumentasikan proses pengambilan limbah B3
9. Setiap melakukan pengambilan sampah B3, wajib memberikan tanda bukti
10. Pihak ke-3 wajib memiliki izin resmi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI
11. Kerjasama dilakukan secara tertulis yang tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU
12. MoU di evaluasi setiap 1 tahun sekali.

d) Tanggapan Pemerintah Kota Dumai dalam pencemaran Limbah B3 di Sungai Sembilan oleh Kasi Penegakan Hukum dan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Khadijah.

pengawasan terhadap penegakan hukum lingkungan ini bertujuan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan apakah industri sudah melaksanakan kegiatan industrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah melakukan pengawasan pelaksanaan AMDAL terhadap industri di kawasan sungai sembilan. Posisi AMDAL atau UKL/UPL bagi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai alat atau pedoman dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap upaya pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan.

Perusahaan yang ada di kawasan sungai Sembilan sudah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan turun kelapangan melakukan pertemuan keperusahaan, melakukan pembinaan sebagai bentuk aturan-aturan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen AMDAL atau UKL/UPL perusahaan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam mengawasi industri yang ada di Kota Dumai dilakukan secara 2 kali dalam setahun, sehingga banyak kejadian yang di duga pencemaran lingkungan dari limbah indsutri kelapa sawit tersebut, dan biasanya pengawasan tidak langsung perusahaan mengirim laporan perusahaan 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

e) Tanggapan LSM PAB Kota Dumai dalam pencemaran Limbah B3 di Sungai Sembilan Oleh Darwis

pencemaran limbah B3 sendiri sudah berlangsung sejak 35 tahun, beulm ada penanganan yang baik terutama di industri kecamatan sungai Sembilan, Dari sisi lingkungan sanksi tidak pernah dibuat penyebabnya Kota Dumai kebijakannya terlalu bergantung, sehingga CSRnya tidak jelas. Dampak yang ditimbulkan dari

pencemaran tersebut yang sudah terjadi itu ikan, ikan dari perairan Dumai sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Faktor yang menghambat, tidak terbukanya AMDAL, sudah dibentuk biasanya tim perwakilan daerah lebih cenderung menyelamatkan diri. Dari LSM PAB sendiri sering menegur secara lisan karena LSM PAB tidak bisa menegur secara administratif.

II. Faktor yang menghambat pemerintah Kota Dumai dalam menanggulangi pencemaran limbah B3 di Sungai Sembilan

a) Minimnya Anggaran

Pengelolaan Limbah B3 di Kota Dumai yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup kota dumai di biayai oleh pemerintah kota dumai yag berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Dumai. Berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2017 target anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 80,649,600.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 77,234,704.00,- dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, pada tahun 2018 target anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 110,000,000.00,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 80,649,600.00,-

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup masih terdapat kekurangan sarana penunjang dalam meningkatkan kualitas Dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini contoh yang berbasis analisis data/sample saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya mempunyai laboratorium sederhana yang belum terakreditasi untuk pengujian kualitas air dan udara

c) Minimnya Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan mengingat akan perkembangan dunia lingkungan Hidup yang semakin pesat sehingga sosok Aparatur yang Berimtak sangat diperlukan Pada Dinas Lingkunngan Hdup Kota Dumai serta memahami proses-proses Dunia industri yang berbasis Teknologi Lingkungan.

d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya limbah B3

Masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud kurangnya pemahaman masyarakat disini adalah ketidak tauan masyarakat tentang nahayanya limbah B3. Oleh karena itu dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta dan aktif dalam menghadapi dan

menanggapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini dapat di artikan sebagai, bagaimana masyarakat untuk tau tentang pengelolaan limbah B3. Karena hal ini dapat membuat pencemaran lingkungan.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tetang berbahaya limbah B3, misalnya banyak masyarakat menggunakan spent bleaching earth untuk digunakan tanah timbun, spent bleaching earth bisa ditemukan dihalam rumah masyarakat, *spent bleaching earth* mengeluarkan bau yang tidak sedap apabila baru saja dikeluarkan dari pengolahannya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Dumai sendiri belum maksimal dalam menyelesaikan masalah limbah B3 yang ada sungai Sembilan Kota Dumai, dikarenakan adanya kesenjangan pemerintah kota dumai sebagai lemabaga teknis tidak mempunyai kemampuan untuk mengeksekusi, ditambah lagi sarana prasarana yang tidak lengkap dan kurangnya skilil sumber daya manusia.Kota Dumai sendiri mempunyai perda no 5 tahun 2017 yang mengatur segala tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.disitu dijelaskan segala pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau

- tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengolah dan penimbunan dilakukan oleh pemerintah Daerah dan DPRD.
2. Untuk pencemaran limbah B3 sendiri sudah berlangsung sejak lama, belum adanya penanganan yang baik dari pemerintah kota Dumai terutama di kawasan industri sungai Sembilan. Untuk sanksi sendiri belum ada satupun sanksi keras yang keluar dari pemerintah kota Dumai ataupun provinsi hanya berupa teguran lisan atau sanksi administrative yang paling tinggi.
 3. Faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Dumai terhadap limbah B3 di sungai sembilan yaitu pertama, masih minimnya anggaran yang dibutuhkan. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, ketiga minimnya sumber daya manusia. keempat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya limbah B3

B. Saran

1. Pemerintah Kota Dumai harus berani memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar, baik dari industri besar ataupun home industri, agar si perusahaan memiliki efek jera terhadap pencemaran limbah B3, dan industri juga harus melakukan cara-cara

pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih dan menyediakan alat pencegahan pencemaran.

2. Pemerintah Kota Dumai harus meletakkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai bidangnya dalam pencemaran limbah B3. Untuk pembiayaan program sebaiknya jangan hanya tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga mengajak pihak swasta, usaha dan masyarakat untuk terlibat didalamnya.
3. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diharapkan dapat mengupayakan sarana prasarana yang kurang agar dapat menunjang kebutuhan dan Melengkapi fasilitas yang ada di laboratorium, sehingga laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai bisa digunakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azra, Azyumardi. 2005. *Demokrasi Hak asasi manusia masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Pt Raja Grafindo.

- Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Dwiyanto Agus. 2006. *Mewujudka Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,(Cetakan Ketiga) Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi industri*, Yogyakarta: ANDI
- Muhammad Latar Arief. 2016. *Pengolahan limbah industri dasar-dasar pengetahuan dan aplikasi di tempat kerja* Yogyakarta: CV andi offset
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Satrawijaya, A. Tresna. 2009. *Pencemaran lingkungan*, Jakarta: Rineka cipta
- Suyanto Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University
- Ubaedillah.A , Rozak Abdul. 2013. *Pancasila demokrasi ham dan masyarakat madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang no 32 tahun 2009
Pencemaran lingkungan hidup
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hokum lingkungan hidup Provins Riau
- Perda Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peraturan walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Dumai